



**LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI**  
**DALAM MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024**  
**Tanggal 16 Januari – 4 Maret 2024**  
**(Masa Sidang Mulai Tanggal 16 Januari – 6 Februari 2024**  
**Dan Masa Reses Mulai Tanggal 7 Februari – 4 Maret 2024)**  
**Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI**  
**Tanggal 8 November 2024**

---

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 adalah sebagai berikut:

**I. FUNGSI LEGISLASI**

Terkait dengan Fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 Komisi VI DPR RI tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Legislasi.

**II. FUNGSI ANGGARAN**

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Anggaran.

**III. FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI pada tanggal 16 Januari 2024, dengan acara membahas program kerja Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.

2. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada tanggal 17 Januari 2024 dengan acara membahas dan menyusun program kerja Masa Sidang III Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.

**A. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI**

Rapat menyetujui pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI untuk menjadwalkan Rapat Kerja/RDP/RDPU/Panja sebagai berikut :

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS) pada tanggal 1 Februari 2024, pembahasan mengenai Masyarakat Adat yang terhimpun dalam Karukunan Warga Puncak Bersama Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, dengan catatan rapat antara lain :

1. Komisi VI DPR RI menerima aspirasi dari Karukunan Warga Puncak/Aliansi Masyarakat Bogor Selatan terkait permasalahan sengketa lahan yang melibatkan BUMN PTPN VIII dan Perum Perhutani dengan masyarakat di Kawasan Tugu, Puncak, Bogor Selatan Provinsi Jawa Barat, serta beberapa permasalahan lain yang dinilai meresahkan warga. Beberapa catatan dan aspirasi yang disampaikan antara lain :
  - a. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Dan Program Kulin KK:
    - HGU Perkebunan Teh;
    - Hutan Lindung Taman Nasional Gede Pangrango (TNGP);
    - Hutan Pangkuan Desa dan Kawasan Perhutani;
    - Monitoring Evaluasi Program Kulin Kk Perhutanan;
    - Sosial KLH;
  - b. Pembangunan Yang Masif / Pembangunan Dan Perijinan:
    - Marak pembangunan tanpa mengantongi ijin;
    - Lemahnya pengawasan dan penindakan;
    - Disinyalir banyak oknum dalam perijinan;
  - c. Akibat dari permasalahan tersebut berdampak pada terganggunya nilai Sosial Budaya lokal yang diakibatkan:
    - Keberadaan imigran dipuncak dinilai meresahkan masyarakat;

- Pemerintah kurang memperhatikan terkait kehidupan sosial warga puncak, kepadatan permukiman penduduk dipuncak saat ini perlu mendapat perhatian serius, kurangnya ruang terbuka hijau dipermukiman-permukiman warga sehingga anak-anak kesulitan untuk bermain terlebih saat ini akses-akses ke sungai banyak menjadi area private, menjadi persoalan sosial dipuncak semakin kompleks;
  - Keberadaan situs-situs tempat bersejarah serta tempat-tempat yang dikeramatkan/ disakralkan oleh warga lokal, kurang mendapat perhatian dinas terkait;
2. Karukunan Warga Puncak/ Aliansi Masyarakat Bogor Selatan mengharapkan adanya Solusi dari Komisi VI DPR RI untuk penyelesaian masalah tersebut, mengingat masalah yang terjadi terkait erat dengan BUMN terutama PTPN VIII dan Perum Perhutani.
  3. Terkait dengan permasalahan yang disampaikan Karukunan Warga Puncak/ Aliansi Masyarakat Bogor Selatan, maka Komisi VI DPR RI akan menindaklanjuti dengan menjadwalkan pertemuan/rapat dengan PTPN VIII, PT Jasa Marga, dan Perum Perhutani guna mencari Solusi dalam penyelesaian masalah tersebut pada masa sidang yang akan datang.

**B. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI**

Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pembahasan ketahanan pangan dan pemantauan pasokan serta distribusi Pupuk dan pengembangan ekosistem industri gula nasional ke Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 s.d 23 Februari 2024.
2. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pemantauan prasarana transportasi jalan tol ruas Yogya – Bawen dan Solo – Yogya – Kulon Progo beserta dukungan teknisnya dan pengembangan pariwisata dan sektor UMKM Pendukungnya ke Provinsi Yogyakarta pada tanggal 19 s.d 23 Februari 2024.

3. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan lapangan ke Pabrik PT. Long Rich Indonesia, pembahasan evaluasi Standar Operasional Prosedur PT. KAI dalam menjamin keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian Bagi Masyarakat serta evaluasi operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati beserta Strategi Pengembangan Investasi ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 19 s.d 23 Februari 2024

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023 – 2024.

Jakarta, 26 Februari 2024  
**KABAGSET KOMISI VI DPR RI,**

**Ttd.**

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si**  
**NIP. 19710407 199203 2 001**